A. Pendahuluan

Untuk mewujudkan manajemen rumah sakit yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan operasional rumah sakit harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional RSUD menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan RSUD Kota Mataram adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan RSUD Kota Mataram serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana RSUD Kota Mataram mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi RSUD Kota Mataram berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan RSUD Kota Mataram apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang–Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 171);
5. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 217 tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1818 tahun 2015).

3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka penyajian laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan peraturan tersebut.

Perkembangan PSAP Baru:

1. PSAP nomor 14 tentang Aset Tak Berwujud efektif berlaku per 1 Januari 2020.
2. PSAP nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan efektif berlaku per 1 Januari 2021.

Sebagai entitas pelaporan, Laporan Keuangan RSUD Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

A. Pendahuluan (Lanjutan)

4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I. Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Pendekatan penyusunan laporan keuangan
- 1.4 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

Bab II. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
- 2.1 Sejarah rumah sakit
- 2.2 Produk layanan
- 2.3 Tempat kedudukan
- 2.4 Visi, misi dan tujuan
- 2.5 Struktur organisasi
- 2.6 Kepegawaian

Bab III. Kebijakan AkuntansiLaporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 3.1 Entitas pelaporan
- 3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 3.4 Penerapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan rekening-rekening akuntansi

Bab IV. Penjelasan Rekening Laporan Operasional
- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Arus Kas
- 4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.3 Neraca
- 4.4 Laporan Operasional (LO)
- 4.5 Laporan Arus Kas (LAK)
- 4.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab V. Lain-Lain

B. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

1 Sejarah Singkat

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram yang beralamat di Jl. Bung Karno No. 3 Pagutan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 420-427 Tahun 2014 Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Surat Keputusan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mataram yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Penetapan RSUD Kota Mataram sebagai rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.

Pembentukan pola pengelolaan keuangan BLUD pada dasarnya karena kesulitan pengelolaan keuangan RSUD sebagai SKPD. Karena core business rumah sakit adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, bukan sebagai SKPD yang dominan menjalankan program dan kegiatan yang terencana. Sehingga diperlukan fleksibilitas pola pengelolaan keuangannya, karena pola pengelolaan sebagai SKPD sangat tidak fleksibel dengan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Legal formal PPK SKPD yang berkenan langsung adalah PP 77 tahun 2010 Pasal 7 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, serta Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Mataram.

2 Produk Layanan

Kegiatan utama BLUD rumah sakit adalah memeberin pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berkesinambungan / terus menerus, dengan dibutuhkan layanan yang cepat, sehingga harus didukung pola pengelolaan keuangan yang fleksibel.

3 Tempat Kedudukan

RSUD Kota Mataram berkedudukan dan berkantor Jl, Bung Karno No.3 Pagutan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat

4 Struktur Organisasi

	2024	2023
Dewan Pengawas		
Ketua Dewan Pengawas	: H. Moh. Syakirin Hukmi, SE. MM	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE. MM
Sekretaris	: Juli Yuspita SSt.	Juli Yuspita SSt.
Anggota	: dr. Emirald Isfihan, MARS.,MH.,CM	dr. Emirald Isfihan, MARS.,MH.,CMC.,I
Anggota	: H. Masbuhin.,S.IP	H. Masbuhin.,S.IP

B Penjelasan atas Informasi Non Keuangan (Lanjutan)

4 Struktur Organisasi (Lanjutan)

Direksi

Direktur	: dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati,Sp.(	dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati,Sp.OG.I
Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan	: drg. Dianita Rahmi	drg. Dianita Rahmi
Wakil Direktur Pelayanan	: dr. Tris Cahyoso	dr. Tris Cahyoso

5 Kepegawaian

Terdiri Dari:

	2024	2023
Pegawai ASN	432 Orang	357 Orang
Pegawai Non ASN	810 Orang	858 Orang
Jumlah Karyawan	1242 Orang	1215 Orang

III. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan RSUD Kota Mataram Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 yaitu PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

1 Entitas Pelaporan

1. RSUD Kota Mataram dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Dalam hal ini RSUD Kota Mataram menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Laporan Keuangan RSUD Kota Mataram ini sebagai entitas pelaporan yang jika dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang memerlukan penyesuaian sebagai entitas akuntansi.

2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan basis kas diterapkan untuk pengakuan komponen laporan keuangan yang disajikan dalam LRA, LPSAL dan LAK.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk barang atau jasa disajikan pula dalam Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan RSUD Kota Mataram tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat jasa atau pelayanan sudah diberikan. Beban diakui pada saat terjadinya transaksi atau beban yang sudah dikeluarkan untuk keperluan operasional, khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kombinasi metode basis kas (*cash basis*) dengan metode basis akrual (*accrual basis*);
3. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;
4. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset; dan
5. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*perpectual*).

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi

4.a Dasar Akuntansi

Laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 yaitu PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

4.a Dasar Akuntansi

Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disajikan dengan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

4.b Basis Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki RSUD Kota Mataram sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional kegiatan RSUD Kota Mataram, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi RSUD Kota Mataram.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan; atau
2. Dimiliki untuk perdagangan atau tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca ; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaanya tidak dibatasi. Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, biaya dibayar di muka.

4.c Kas dan Setara Kas

Pengertian

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sum,bernya berasal dari pelaksanaan tuga pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah dirterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengan Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Pengakuan

Kas dan setara kas diakui dan dicatat pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Pengukuran

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkan. Kas dan setara kas dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dan setara kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dan setara kas dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengan Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan degan kas dan setara kas di Neraca maupun catatan atas laporan keuangan adalah:

Pengungkapan

- Rincian jumlah kas dan setara kas
- Klasifikasi kas dan setara kas dan jumlah masing-masing

4.d Investasi Jangka Pendek/Investasi Lancar

Pengertian

Investasi jangka pendek adalah bentuk investasi yang dimaksudkan untuk memanfaatkan dana RSUD Kota Mataram dalam jangka pendek dengan jatuh tempo atau pemilikannya dimaksudkan tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal neraca. Investasi jangka pendel ini tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan.

Pengakuan dan Pencatatan

Investasi jangka pendek diakui pada saat di investasikan berdasarkan nilai perolehan investasi jangka pendek

Pengukuran

Investasi jangka pendek dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada investasi jangka pendek dalam valuta asing, maka harus dikonversi berdasarkan nilai kur tengan Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, investasi jangka pendek dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca

Penurunan Nilai

Apabila berdasarkan kondisi pasar dan estimasi profesional kemungkinan besar akan terjadi penurunan/kenaikan nilai, maka laba atau rugi yang belum terealisasi tersebut diakui sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah dan tidak boleh diakui sebagai penghasilan sampai saat laba atau rugi tersebut direalisasi.

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

Penyajian dan Pengungkapan (Lanjutan)

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan investasi jangka pendek di Neraca maupun Catatan Atas Laporan Keuangan adalah:
Rincian jumlah investasi
Jenis dan penempatan investasi
Jangka waktu dan
Penilaian investasi dalam laporan

4.e Piutang

Pengertian

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang timbul dari adanya penyerahan jasa atau barang yang pembayarannya tidak bersamaan dengan waktu tidak bersamaan dengan waktu terjadinya penyerahan jasa/barang dan / atau pembayaran atas penyerahan jasa/barang baru dilakukan setelah beberapa hari atau beberapa bulan, lazimnya diklasifikasikan sebagai Piutang Usaha. Transaksi lain yang memunculkan piutang bagi RSUD Kota Mataram dapat diklasifikasikan ke dalam Piutang lain-lain seperti pinjaman uang kepada karyawan atau pihak lain.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat hak klaim untuk mendapatkan arus kas atau manfaat ekonomi lainnya dari penyerahan barang atau jasa telah terpenuhi. Hak klaim atau manfaat ekonomi tersebut dapat diukur dan diestimasi.

Pengukuran

Piutang dinilai sebesar nilai rupiah (bersih) yang diperkirakan dapat direalisasikan. Untuk itu piutang-piutang yang mempunyai kemungkinan tak tertagih hendaknya dibuatkan penyisihannya dalam jumlah yang layak.
Penentuan besarnya nilai penyisihan pada tiap akhir tahun yaitu 6 bulan sampai 12 bulan 50% dan lebih dari 12 bulan 100%

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain :
Klasifikasi piutang menurut umur.
Klasifikasi piutang debitur dan jenisnya

4.f Persediaan

Pengertian

Persediaan adalah barang untuk dijual atau barang habis pakai dalam satu periode akuntansi. Persediaan terdiri atas : bahan habis pakai kantor, obat-obatan, alat kesehatan, alat listrik, alat kebersihan, bahan makanan kering, bahan dan alat kesehatan radiologi, gas mesik, karcis retribusi dan barang cetaka dan lain-lain. Persediaan bahan/barang yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara sewakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok Aset Lancar melainkan digolongkan secara Asset Lainnya.

Pengakuan

Pembelian barang untuk dijual (obat-obatan dan alat kesehatan) dan barang habis pakai diakui/dicatat sebagai biaya pada saat pembelian atau perolehan berdasarkan nilai perolehan (termasuk biaya lainnya yang terjadi untuk membawa barang tersebut ke RSUD Kota Mataram).

Pengukuran

Persediaan dinilai berdasarkan :
Harga perolehan atau nilai realisasi bersih (harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual) mana yang lebih rendah:
Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri;
Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
Pencatatan yang digunakan terhadap persediaan menggunaikan pendekatan Physical Inventory Method yaitu pembelian/penerimaan barang tidak dicatat kedalam persediaan, akan tetapi dibukukan lamngsung sebagai biaya sesuai ahrga perolehan pada saat barang diterima. Nilai persediaan ini sekaligus digunakan sebagai koreksi pengurang (kredit) terhadap pos biaya dan pada awal tahun berikutnya nilai persediaan tersebut dibukukan kembali (reserving entry) menjadi biaya.
Dasar penilaian terhadap persediaan pada saat penyusunan neraca adalah dengan harga perolehan menggunakan metode First In First Out (FIFO / Masuk Pertama Keluar Pertama). Akan tetapi jika suatu jenis persediaan menurun nilainya dan nilainya tercatatnya tidak dapat dipulihkan secara penuh (misalnya karena kerusakan, keusangan, atau penurunan harga jual), maka persediaan diukur berdasarkan nilai realisasi bersih, serta mengakui kerugian penurunan nilai.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain:
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, atau metode penilaian persediaan. Jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi bersih, dan nilai tercatat di neraca. Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan periode.

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

4.g Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka kegiatan, uang muka pembelian barang/jasa. Uang muka kegiatan adalah pembayaran di muka untuk suatu kegiatan mendesak RSUD Kota Mataram yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggung jawabkan setelah kegiatan tersebut selesai.

Uang muka pembelian barang/jasa adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut barang dan jasa belum diterima. Pembayaran di muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian. Uang muka berfungsi untuk membiayai kelancaran operasional RSUD Kota Mataram.

4.h Belanja Dibayar di Muka

Belanja dibayar di muka adalah pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Belanja dibayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan Beban RSUD Kota Mataram.

4.i Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

4.j Aset Tetap

Pengertian

Merupakan aset yang dimiliki untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan (*cost*) aset tetap dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal RSUD Kota Mataram; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan RSUD Kota Mataram.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat siap digunakan untuk kegiatan operasional sesuai dengan posisi dan kondisi yang direncanakan. Jika aset tetap tidak memberikan manfaat lagi untuk kegiatan operasional, maka harus dieliminasi dari aset tetap.

Pengakuan awal aset tetap dalam neraca awal RSUD Kota Mataram menggunakan dasar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan; atau nilai wajar.

Pengukuran

Seluruh biaya yang direalisasi untuk pengadaan aset tetap sejak perencanaan sampai pada posisi dan kondisi aset tetap dapat digunakan, maka biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya perolehan. Namun jika biaya perolehan tersebut berbeda signifikan dengan nilai wajar untuk memperoleh aset yang bersangkutan, maka perbedaan signifikan tersebut diakui sebagai kerugian dan dilaporkan dalam laporan operasional.

Secara periodik, nilai tercatat aset tetap harus dilakukan review dan dilakukan penyesuaian jika terdapat perbedaan signifikan dengan nilai wajarnya. Jika nilai tercatat lebih besar dari nilai wajar, maka harus diakui adanya kerugian penurunan nilai dan dilaporkan dalam laporan operasional. Sedangkan jika nilai tercatat lebih rendah dari nilai wajar, maka dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan akumulasi penyusutan.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3	**Aset Tetap**	
1.3.1	**Tanah**	
1.3.2	**Peralatan dan Mesin**	
1.3.2.1	Alat-Alat Besar Darat	10
1.3.2.2	Alat-Alat Besar Apung	8
1.3.2.3	Alat-alat Bantu	7
1.3.2.4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.3.2.5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1.3.2.6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1.3.2.7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1.3.2.8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3.2.9	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.2.10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.2.12	Alat Ukur	5
1.3.2.12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1.3.2.13	Alat Pemeliharaan	4
1.3.2.14	Alat Kantor	5
1.3.2.15	Alat Rumah Tangga	5

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

4.j Aset Tetap (Lanjutan)

Pengukuran (Lanjutan)

1.3.2.16	Peralatan Komputer	4
1.3.2.17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.3.2.18	Alat Studio	5
1.3.2.19	Alat Komunikasi	5
1.3.2.20	Peralatan Pemancar	10
1.3.2.21	Alat Kedokteran	5
1.3.2.22	Alat Kesehatan	5
1.3.2.23	Unit-Unit Laboratorium	8
1.3.2.24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1.3.2.25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.2.26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1.3.2.27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing	10
1.3.2.29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.2.30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1.3.2.31	Senjata Api	10
1.3.2.32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1.3.2.33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1.3.3	**Gedung dan Bangunan**	
1.3.3.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.3.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1.3.3.3	Bangunan Menara	40
1.3.3.4	Bangunan Bersejarah	50
1.3.3.5	Tugu Peringatan	50
1.3.3.6	Candi	50
1.3.3.7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1.3.3.8	Tugu Peringatan Lain	50
1.3.3.9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1.3.3.10	Rambu-Rambu	50
1.3.3.11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1.3.4	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
1.3.4.1	Jalan	10
1.3.4.2	Jembatan	50
1.3.4.3	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1.3.4.5	Bangunan Air Rawa	25
1.3.4.6	Bangunan	10
1.3.4.7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan AirTanah	30
1.3.4.8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1.3.4.9	Bangunan Air Kotor	40
1.3.4.10	Bangunan Air	40
1.3.4.11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1.3.4.12	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.4.16	Instalasi Gardu	40
1.3.4.17	Instalasi Pertahanan	30
1.3.4.18	Instalasi Gas	30
1.3.4.19	Instalasi Pengaman	20
1.3.4.20	Jaringan Air Minum	30
1.3.4.21	Jaringan Listrik	40
1.3.4.22	Jaringan Telepon	20
1.3.4.23	Jaringan Gas	30

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap, nilai per unitnya sebagai berikut:

a) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000 ke atas; peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000 ke atas;
b) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000 ke atas; dan
c) Aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000 ke atas.

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

4.j Aset Tetap (Lanjutan)

Pengukuran (Lanjutan)

Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
Jika tahun perolehannya tidak diketahui, maka aset tersebut ditaksir sisa masa manfaatnya sesuai dengan kondisi sebagai dasar penyusutan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset-aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya yang membawa aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

- Aset tetap dirinci per golongan dan jenis;
- Metode penyusutan;
- Rekonsiliasi saldo awal ke saldo akhir;
- Penyesuaian nilai tercatat; dan
- Penghapusan.

4.k Aset Lainnya

Pengertian

Merupakan aset yang tidak dapat digolongkan dalam golongan aset tersebut di atas, yaitu:

- Beban ditangguhkan atau pengeluaran yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun;
- Aset dalam pembangunan; dan
- Aset tetap yang tidak digunakan lagi.

Pengakuan

- Beban ditangguhkan diakui pada saat pengeluaran;
- Aset dalam pembangunan diakui sesuai kemajuan prestasi pekerjaan; dan
- Aset tetap yang tidak digunakan lagi diakui pada saat aset tetap tersebut dinyatakan tidak digunakan sesuai berita acara.

Pengukuran

- Beban ditangguhkan sebesar beban perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.
  Masa amortisasi ditetapkan:
  Aplikasi komputer : 5 Th.
  Beban ditangguhkan lainnya : sesuai dengan kondisi.
  Apabila diketahui periodesasi manfaat pengeluaran untuk beban ditangguhkan (misalnya: akreditasi setiap tiga tahun sekali) maka amortisasi sesuai dengan periodisasi masa tersebut.
- Aset dalam pembangunan sebesar nilai prestasi pekerjaan sesuai berita acara.
- Aset tetap yang tidak digunakan sebesar nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

- Dirinci per golongan dan jenis; dan
- Metode dan masa amortisasi.

4.l Basis Pengukuran Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelsainnya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD Kota Mataram. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagi konsenkuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang diukur sebesar nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai kewajiban RSUD Kota Mataram pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berkurang pada saat pembayaran/ penyelsaiaan oleh RSUD Kota

4.m Utang Usaha

Pengertian

Merupakan jumlah yang harus dibayar pada masa yang akan datang yang terjadi atas peristiwa masa lalu dan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan

Pada saat terjadi transaksi dan berkurang pada saat pembayaran.

Pengukuran

Sebesar harga faktur atau dengan taksiran nilai wajar jika nilainya belum diketahui.

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

4.m Utang Usaha (Lanjutan)

Penyajian

- Disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek, jika jatuh temponya paling lama 1 (satu) tahun.
- Disajikan sebagai kewajiban jangka panjang, jika jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis kewajiban dan krediturnya; dan
- Persyaratan pinjaman, suku bunga (jika ada), jangka waktu dan tanggal jatuh temponya.

4.n Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Pengertian

Merupakan beban jasa yang telah diterima/dinikmati yang sampai dengan tanggal neraca belum dibayar, terjadi atas peristiwa masa lalu dan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan

Pada saat terjadi transaksi dan berkurang pada saat pembayaran.

Pengukuran

Sebesar harga faktur, tarif atau dengan taksiran nilai wajar jika nilainya belum diketahui.

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek.

Pengungkapan

Dirinci per jenis jasa yang harus dibayar.

4.o Ekuitas

Pengertian

Merupakan hak residual Pemda pemilik RSUD Kota Mataram atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban.

Pengakuan

- Pada saat awal BLUD dari hasil inventarisasi neraca awal;
- Pada saat terjadi surplus/defisit berdasarkan laporan operasional; dan
- Pada saat terjadi koreksi saldo awal karena kesalahan.

Pengukuran

- Harga perolehan atau nilai wajar; dan
- Selisih antara aset dan kewajiban, khusus untuk neraca awal.

Penyajian

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.p Pendapatan Jasa Layanan

Pengertian

1. Pendapatan LRA

Pendapatan RSUD Kota Mataram yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Negara/ Daerah merupakan pendapatan Negara/Daerah.

RSUD Kota Mataram diberikan fleksibelitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/ jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja.

Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan RSUD Kota Mataram tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas negara/ Daerah.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan pembukaan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan kerja sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakana hak mitra KSO.

Pendapatan-LRA pada RSUD Kota Mataram diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LRA pada RSUD Kota Mataram merupakan pendapatan bukan pajak.

Termasuk pendapatan bukan pajak pada RSUD Kota Mataram:

a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
c. Pendapatan hasil kerja sama;
d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
e. Pendapatan RSUD Kota Mataram lainnya.

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

4.p Pendapatan Jasa Layanan (Lanjutan)

Pengertian (Lanjutan)

1. Pendapatan LRA (Lanjutan)

Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksudkan adalah imbalan yang diperoleh jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana adala perolehan dari kerja sama operasional, sewa-menyewa dan usaha laiinnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD Kota Mataram.
Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban RSUD Kota Mataram untuk menyerahkan barang/jasa.
Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud, antara lain berupa:
a. Hasil Penjualan;
b. Jasa Giro;
c. Keuntungan Selisih
d. Komisi, potongan
Belanja RSUD Kota Mataram diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk RSUD Kota Mataram, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada RSUD Kota Mataram selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit LRA.
Transaksi pembayaran dapat terjadi pada RSUD Kota Mataram yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/ atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLU terjadi saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/ atau pengeluaran investasi jangka panjang.
Penerimaan pembiayaan pada RSUD Kota Mataram diakui pada saat kas yang diterima RSUD Kota Mataram dasahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
Pengeluaran pembiayaan pada RSUD Kota Mataram diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan RSUD Kota Mataram diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto.
Selisih lebih/ kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Penerimaan RSUD Kota Mataram

RSUD Kota Mataram merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki karakter khusus karena berperan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyrakata dengan mendapatkan dana dukungan dari APBD.
Setiap penerimaan yang diperoleh dari masyrakat sebagai akibat pemberian pelayanan medis merupakan pendapatan dari RSUD Kota Mataram. Selanjutnya, semua pendapatan RSUD Kota Mataram otomatis menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus diadministrasikan kedalam APBD.
RSUD Kota Mataram mengakui retribusi usaha pelayanan kesehatan pada saat mengajukan pembayaran klaim kepihak ketiga (BPJS), bukan pada saat RSUD Kota Mataram memberikan pelayanan kepada pasien.

Penerimaan RSUD Kota Mataram dari JPKMM/BPJS

Pembiayaan biaya perawatan medis dari pasien masyarakat miskin yang dibayari oleh pemerintah.

Penggunaan Langsung atas Penerimaan RSUD Kota Mataram

Pada prinsipnya penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan RSUD Kota Mataram harus dilakukan melalui kas daerah. Namun demikian, jika penerimaan RSUD Kota Mataram digunakan langsung untuk keperluan operasional RSUD Kota Mataram, maka terlebih dahulu harus berstatus BLUD.
Status organisasi Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berkurang pada saat pembayaran/ penyelsaiaan oleh RSUD Kota Mataram. berstatus BLUD, maka Penerimaan dan pengeluarannya dilakukan oleh RSUD Kota Mataram yang bersangkutan. Pada akhir periode akuntansi akan dilaporkan oleh Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berkurang pada saat pembayaran/ penyelsaiaan oleh RSUD Kota Mataram. untuk dikondisikan ke dalam LKPD.

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

4.p Pendapatan Jasa Layanan

2. Pendapatan LO

Merupakan kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang timbul atas penyerahan barang dan jasa kepada pasien atau pihak yang menanggung dan hak kapitasi dalam satu periode.
Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
a) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD
b) Pendapatan Layanan yang bersumber dari masyrakat;
c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
d) Pendapatan hasil kerjasama;
e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
f) Pendapatan RSUD Kota Mataram lainnya.

Pendapatan Dari Layanan Yang Bersumber Dari Masyarakat

Merupakan pendapatan utama (pokok) yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan kesehatan yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan kesehatan selanjutnya dapat dirinci per jenis layanan kesehatan yang diberikan RSUD Kota Mataram terdiri dari:
a) Pendapatan rawat inap;
b) Pendapatan rawat jalan;
c) Pendapatan instalasi gawat darurat (IGD);
d) Pendapatan Radiologi;
e) Pendapatan farmasi/apotik; dan
f) Pendapatan Lain-lain.

Namun demikian, dalam hal terdapat kesulitan dalam mengklasifikasi pendapatan per jenis layanan, klasifikasi lain dapat dilakukan misalnya berdasarkan segmen penerimaannya (sumbernya), misalnya:
a) Pendapatan BPJS
b) Pendapatan Jamkesda
c) Pendapatan jaminan lainnya
d) Pendapatan kerjasama instansi/ perusahaan
e) Pendapatan lainnya

Pendapatan diakui berdasarkan accrual basis, yaitu mengakui transaksi pendapatan saat transaksi atau peristiwa pendapatan itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima di kas RSUD Kota Mataram. Pendapatan diakui sebagai berikut:

Pengakuan

1. Pendapatan LRA

Pada saat kas dan setara kas diterima RSUD Kota Mataram.

2. Pendapatan LO

- Pada saat selesai pelayanan pasien yaitu saat pasien pulang; dan
- Untuk sistem kapitasi yang tidak harus dipertanggungjawabkan jumlah dan beban pasien yang telah dilayani, pendapatan diakui pada saat uang diterima.
- Pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang dan/ atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat;

Pengukuran

- Sesuai dengan tarif yang berlaku untuk pasien yang bersangkutan; dan
- Sedangkan untuk sistem kapitasi, sesuai dengan uang yang diterima.

Pendapatan dari jasa layanan kesehatan dan pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima dari suatu jasa yang di berikan, sedangkan nilai piutang pelayanan disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruhnya tagihan piutang dikurang dengan penyisihan piutang.
Pendapatan yang berasal dari BPJS dinilai pada saat nilai pendapatan yang akan diterima tersebut dapat ditaksir secara andal dengan tarif yang dapat ditentukan secara andal.

Penyajian

1. Pendapatan LRA

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

2. Pendapatan LO

Disajikan di laporan operasional.

Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan operasional untuk setiap jenis pendapatan.
Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Pengungkapan

Dirinci per nama dan pihak yang menanggung pembayaran.

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

4.q Pendapatan Hibah

Pengertian

Merupakan hibah dalam bentuk tunai maupun natura dari pihak ketiga.

Pendapatan merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi RSUD Kota Mataram untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi Hibah Tidak Terikat. Hibah Terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah, sedangkan hibah tidak terkait adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah. Pendapatan yang dapat diakui dalam hibah ini adalah untuk hibah yang tidak terikat.

Pengakuan

1. **Pendapatan LO**
   Pada saat uang atau barang diterima.
   Pada saat hak kepemilikan barang berpindah. Hibah yang diakui sebagai pendapatan ini adalah untuk hibah yang tidak terikat. Sementara hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima RSUD Kota Mataram.

2. **Pendapatan LRA**
   Pada saat kas dan setara kas diterima.

Pengukuran

Tunai sesuai nilai nominal. Natura sebesar harga perolehan sesuai faktur atau nilai wajar barang yang diterima.

Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan; pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh RSUD Kota Mataram.

Penyajian

1. **Pendapatan LO**
   Disajikan di laporan operasional.
2. **Pendapatan LRA**
   Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci sesuai sumber hibah.

4.r Pendapatan Hasil Kerjasama

Pengertian

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari pihak ketiga atas kerjasama dengan RSUD Kota Mataram.

Pendapatan yang diperoleh dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas

Pengakuan

Pada saat uang, barang atau jasa diterima, karena tidak terdapat perbedaan material antara basis akrual dan basis kas.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal sesuai perjanjian kerjasama.

Penyajian

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci per nama kerjasama dan pihak ketiga.

4.s Pendapatan APBD

Pengertian

- Penerimaan berupa dana untuk keperluan belanja operasional (pegawai, barang dan jasa dan Promkes) dan
- Penerimaan berupa barang (obat, barang habis pakai, aset tetap, dan aset lainnya).

Merupakan pendapatan yang berasal dari alokasi dana APBD, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Pendapatan RSUD Kota Mataram yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang berasal dari otoritas kredit anggaran pemerintah daerah, bukan dari kegiatan pembebanan APBD. Pendapatan yang berasal dari alokasi APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Belanja modal yang bersumber dari APBN dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan, dan lain-lain.

Pengakuan

Pada saat pencairan SP2D.

Pada saat pengeluaran belanja yang dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Pendapatan dari APBD/N dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM.

Penyajian

Disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci per jenis belanja dan per nomor SP2D sebagai lampiran.

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

4.t Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain

a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
b) Hasil pemanfaatan kekayaan;
c) Jasa giro;
d) Pendapatan bunga;
e) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
f) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau
g) Hasil investasi;
h) Pendapatan APBD/APBN; dan
i) Hasil kerja sama.

4.u Beban dan Belanja

Pengertian

1. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi dalam

2. Belanja

Merupakan semua pengeluaran kas dan setara kas dari Bendahara Pengeluaran RSUD Kota Mataram yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan, kecuali transaksi pembiayaan.

Pengakuan

1. Beban

Pada saat penurunan aset dan/atau timbulnya kewajiban atas transaksi operasional.

Beban (*expense*) pada umumnya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal. Untuk beban yang belum diketahui jumlahnya secara pasti sampai penutupan buku, maka pengakuannya didasarkan atas transaksi yang dilakukan oleh fungsi teknis. Surplus/ defisit yang timbul sebagai akibat perbedaan antara transaksi dengan jumlah sebenarnya dibukukan sebagai beban tahun berjalan, yaitu pada saat diketahui timbulnya perbedaan tersebut.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari RSUD Kota Mataram.

Terjadinya konsumsi aset adalah pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

2. Belanja

Pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran RSUD Kota Mataram.

Pengukuran

1. Beban

Sebesar harga perolehan.

Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.

Jumlah beban yang telah terjadi atau merupakan beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.

Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan.

2. Belanja

Sebesar kas dan setara kas yang dikeluarkan.

Penyajian

1. Beban

Disajikan di laporan operasional dengan golongan beban operasional dan beban non operasional.

Beban RSUD Kota Mataram diklasifikasikan sebagai berikut:

- Beban Pegawai
- Beban Persediaan
- Beban Jasa
- Beban Pemeliharaan
- Beban Langganan Daya dan Jasa
- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Penyisihan, Penyusutan Dan Amortisasi
- Beban Bunga

2. Belanja

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Beban operasional dirinci sesuai dengan fungsi beban.

D. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan

1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a Pendapatan LRA

Terdiri atas:

	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan jasa dari layanan masyarakat			
Pasien BPJS	188,147,000,000.00	205,571,723,941.00	109.26
Pasien Umum	17,403,000,000.00	15,797,883,265.03	90.78
Pasien Tidak Mampu	3,600,000,000.00	3,601,670,949.00	100.05
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain			
Sewa Minimarket dan ATM	70,000,000.00	7,000,000.00	10.00
Sewa Lahan Parkir	100,000,000.00	138,118,400.00	138.12
Diklat	550,000,000.00	1,271,792,896.00	231.24
Pendapatan Lain lain	10,000,000.00	110,650,186.00	1,106.50
Pendapatan usaha lainnya			
Jasa Giro	120,000,000.00	55,469,747.39	46.22
Jumlah	**210,000,000,000.00**	**226,554,309,384.42**	**107.88**

Pendapatan jasa dari layanan masyarakat pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp229.426.515.637,44 menjadi Rp224.971.278.155,03.

b Pendapatan Transfer APBD

Terdiri atas:

	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Transfer APBD			
Alokasi belanja pegawai	36,940,788,004.00	28,011,192,990.00	75.83
Alokasi belanja barang dan jasa	13,110,978,930.00	12,581,154,099.00	95.96
Alokasi belanja modal	87,532,979,300.00	83,352,807,262.00	95.22
Jumlah	**137,584,746,234.00**	**123,945,154,351.00**	**90.09**

Pendapatan Transfer APBD sebesar Rp123.945.154.351,00 merupakan pencairan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Pembayaran Belanja APBD.

c Belanja Pegawai

Terdiri atas:

	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai			
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	24,788,840,652.00	23,416,110,406.00	94.46
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12,151,947,352.00	4,595,082,584.00	37.81
Belanja Pegawai BLUD	12,750,000,000.00	12,023,872,580.00	94.30
Jumlah	**49,690,788,004.00**	**40,035,065,570.00**	**80.57**

d Belanja Barang dan Jasa

Terdiri atas:

	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang	8,280,000,000.00	8,279,699,160.00	100.00
Belanja Jasa	4,830,978,930.00	4,301,454,939.00	89.04
Belanja Barang dan Jasa BLUD	187,599,263,777.00	208,298,138,007.81	111.03
Jumlah	**200,710,242,707.00**	**220,879,292,106.81**	**110.05**

e Belanja Modal

Terdiri atas:

	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal			
Belanja Modal Tanah	12,000,000,000.00	9,129,291,000.00	76.08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67,747,416,631.00	63,626,847,412.00	93.92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30,884,384,133.00	26,072,864,000.00	84.42
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3,742,352,750.00	3,201,219,000.00	85.54
Jumlah	**114,374,153,514.00**	**102,030,221,412.00**	**89.21**

D. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan (Lanjutan)

1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Lanjutan)

f Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Terdiri atas:

	2024		
	Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**%**
Penggunaan SILPA	17,190,437,991.00	17,190,437,990.71	100.00
Penerimaan dari Divestasi	-	-	
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	-	-	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam	**17,190,437,991.00**	**17,190,437,990.71**	**100.00**

2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Terdiri atas:

a. Penggunaan SILPA tahun Sebelumnya

	2024	**2023**	**Kenaikan (Penurunan)**	
			(Rp)	**%**
PT Bank Nusa Tenggara Barat	1,175,574,189.00	146,702,772.00	1,028,871,417.00	701.33
PT Bank Rakyat Indonesia	974,663,287.00	459,068,490.30	515,594,796.70	112.31
PT Bank Negara Indonesia	3,074,983,404.00	7,897,261,859.00	(4,822,278,455.00)	(61.06)
PT Bank Mandiri (KCP Ampenan)	618,018,161.50	269,244,639.00	348,773,522.50	129.54
PT Bank Mandiri (AA Gde Ngurah)	426,967,177.60	205,325,465.48		
PT Bank Syariah Indonesia	10,243,701,672.12	-	10,243,701,672.12	
PT Bank CIMB Syariah	676,530,099.49	290,129,424.00	386,400,675.49	133.18
Jumlah	**17,190,437,990.71**	**9,267,732,649.78**	**7,922,705,340.93**	**85.49**

b. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

	2024	**2023**	**Kenaikan (Penurunan)**	
			(Rp)	**%**
PT Bank Nusa Tenggara Barat	1,175,574,189.00	146,702,772.00	1,028,871,417.00	701.33
PT Bank Rakyat Indonesia	974,663,287.00	459,068,490.30	515,594,796.70	112.31
PT Bank Negara Indonesia	3,074,983,404.00	7,897,261,859.00	(4,822,278,455.00)	(61.06)
PT Bank Mandiri (KCP Ampenan)	618,018,161.50	269,244,639.00	348,773,522.50	129.54
PT Bank Mandiri (AA Gde Ngurah)	426,967,177.60	205,325,465.48	221,641,712.12	107.95
PT Bank Syariah Indonesia	10,243,701,672.12	-	10,243,701,672.12	
PT Bank CIMB Syariah	676,530,099.49	290,129,424.00	386,400,675.49	133.18
Jumlah	**17,190,437,990.71**	**9,267,732,649.78**	**7,922,705,340.93**	**85.49**

c. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

	2024	**2023**	**Kenaikan (Penurunan)**	
			(Rp)	**%**
PT Bank Nusa Tenggara Barat	7,286,653.00	1,175,574,189.00	(1,168,287,536.00)	(99.38)
PT Bank Rakyat Indonesia	43,728,845.00	974,663,287.00	(930,934,442.00)	(95.51)
PT Bank Negara Indonesia	34,264,636.00	3,074,983,404.00	(3,040,718,768.00)	(98.89)
PT Bank Mandiri (KCP Ampenan)	18,678,747.79	618,018,161.50	(599,339,413.71)	(96.98)
PT Bank Mandiri (AA Gde Ngurah)	28,728,711.05	426,967,177.60	(398,238,466.55)	(93.27)
PT Bank Syariah Indonesia	4,567,771,381.26	10,243,701,672.12	(5,675,930,290.86)	(55.41)
PT Bank CIMB Syariah	44,863,663.22	676,530,099.49	(631,666,436.27)	(93.37)
Jumlah	**4,745,322,637.32**	**17,190,437,990.71**	**(12,445,115,353.39)**	**(72.40)**

D. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan (Lanjutan)

3 Neraca

a Kas di BLUD

Terdiri atas:

	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Bank			-	
PT Bank Nusa Tenggara Barat	7,286,653.00	1,175,574,189.00	(1,168,287,536.00)	(99.38)
PT Bank Rakyat Indonesia	43,728,845.00	974,663,287.00	(930,934,442.00)	(95.51)
PT Bank Negara Indonesia	34,264,636.00	3,074,983,404.00	(3,040,718,768.00)	(98.89)
PT Bank Mandiri (KCP Ampenan)	18,678,747.79	618,018,161.50	(599,339,413.71)	(96.98)
PT Bank Mandiri (AA Gde Ngurah)	28,728,711.05	426,967,177.60	(398,238,466.55)	(93.27)
PT Bank Syariah Indonesia	4,567,771,381.26	10,243,701,672.12	(5,675,930,290.86)	(55.41)
PT Bank CIMB Syariah	44,863,663.22	676,530,099.49	(631,666,436.27)	(93.37)
Jumlah	**4,745,322,637.32**	**17,190,437,990.71**	**(12,445,115,353.39)**	**(72.40)**

b Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Terdiri atas:

	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Pasien BPJS	21,011,683,295.00	18,197,566,500.00	2,814,116,795.00	15.46
Pasien Covid	11,906,943,614.00	11,991,572,600.00	(84,628,986.00)	(0.71)
Pasien Umum	4,711,178,947.25	4,559,573,167.25	151,605,780.00	3.32
Pasien Tidak Mampu	-	4,891,948,306.00	(4,891,948,306.00)	(100.00)
Piutang Dari Pihak Kerjasama	1,494,663,787.00	591,749,004.00	902,914,783.00	152.58
Piutang Lainnya	97,593,200.00	82,593,200.00	15,000,000.00	18.16
Jumlah	**39,222,062,843.25**	**40,315,002,777.25**	**(1,092,939,934.00)**	**(2.71)**

c Penyisihan Piutang

Terdiri atas:

	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Pasien Covid	8,930,207,710.50	7,695,222,026.00	1,234,985,684.50	16.05
Pasien Umum	4,711,178,947.25	6,701,753,493.50	(1,990,574,546.25)	(29.70)
Piutang Dari Pihak Kerjasama	119,592,542.60	-	119,592,542.60	
Piutang Lainnya	29,000,000.00	-	29,000,000.00	
Jumlah	**13,789,979,200.35**	**14,396,975,519.50**	**(606,996,319.15)**	**(4.22)**

d Persediaan

Terdiri atas:

	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Obat dan BHP	13,392,890,711.87	13,887,360,091.00	(494,469,379.13)	(3.56)
Gizi	53,447,555.34	27,137,954.00	26,309,601.34	96.95
ATK dan Cetakan	31,877,000.00	13,138,751.00	18,738,249.00	142.62
Alat RT	124,874,452.52	16,180,000.00	108,694,452.52	671.78
Jumlah	**13,603,089,719.73**	**13,943,816,796.00**	**(340,727,076.27)**	**(2.44)**

e Aset Tetap

Terdiri atas:

	Saldo 31-Des-2023	Mutasi		Saldo 31-Des-2024
		Tambah	Kurang	
Biaya Perolehan:				
Tanah	23,841,232,808.00	9,129,291,000.00	-	32,970,523,808.00
Peralatan dan Mesin	500,930,610,356.00	63,573,962,412.00	-	564,504,572,768.00
Gedung dan Bangunan	190,464,569,705.00	26,072,864,000.00	-	216,537,433,705.00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12,907,725,601.00	3,201,219,000.00	-	16,108,944,601.00
Aset Tetap Lainnya	242,000,000.00	-	-	242,000,000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12,831,179,100.00	-	-	12,831,179,100.00
Jumlah	**741,217,317,570.00**	**101,977,336,412.00**	**-**	**843,194,653,982.00**

D. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan (Lanjutan)

3 Neraca (Lanjutan)

e Aset Tetap (Lanjutan)

	Saldo	Mutasi		Saldo
	31-Des-2023	Tambah	Kurang	31-Des-2024
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan Mesin	334,877,232,735.21	54,551,322,861.00	-	389,428,555,596.21
Gedung dan Bangunan	19,956,511,884.00	3,845,793,291.66	-	23,802,305,175.66
Jalan, Jaringan, dan	2,414,697,735.00	494,125,242.00	-	2,908,822,977.00
Aset Tetap Lainnya	242,000,000.00	-	-	242,000,000.00
Jumlah	**357,490,442,354.21**	**58,891,241,394.66**	**-**	**416,381,683,748.87**
Nilai Buku	**383,726,875,215.79**			**426,812,970,233.13**

Terkait Kontruksi Dalam Pengerjaan manajemen RSUD Kota Mataram masih berproses mencari dokumen bukti pembayaran dan serah terima, namun demikian aset Gedung Rehab Medik dan Pengembangan Rawat Jalan sudah dimanfaatkan sejak tahun 2019 dan Pemulasaran Jenazah, Ruang Isolasi sudah dimanfaatkan sejak tahun 2021.

f Aset Lainnya

Terdiri atas:

	Saldo	Mutasi		Saldo
	31-Des-2023	Tambah	Kurang	31-Des-2024
Biaya Perolehan:				
Aset Tidak Berwujud	3,245,292,000.00	-	-	3,245,292,000.00
Aset Lain-lain	23,329,094,575.00	-	-	23,329,094,575.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2,845,493,134.00)	(377,984,033.00)	-	(3,223,477,167.00)
Jumlah	**23,728,893,441.00**	**(377,984,033.00)**	**-**	**23,350,909,408.00**

Aset tidak berwujud adalah aset dalam bentuk software yang digunakan oleh RSUD Kota Mataram dalam mendukung kegiatan operasional Rumah Sakit.

Aset lain-lain berupa mesin, peralatan dan aset berwujud lainnya yang tidak berfungsi (tidak produktif) karena rusak dan aset yang eksistensi fisknya masih belum jelas dinilai berdasarkan nilai bukunya atau estimasi nilai wajar apabila tidak terdapat nilai bukunya.

g Kewajiban

Terdiri atas:

	Saldo	Mutasi		Saldo
	31-Des-2023	Tambah	Kurang	31-Des-2024
Utang Kepada Pihak Ketiga :				
Utang Obat	8,075,260,373.00	59,904,203,865.00	45,416,004,797.00	22,563,459,441.00
Utang Bagian Penunjang	624,480,763.00	4,333,894,148.00	3,186,355,376.00	1,772,019,535.00
Utang Jasa Pelayanan	7,383,555,879.00	93,423,055,206.00	88,438,915,438.00	12,367,695,647.00
Utang Belanja Pegawai	1,170,967,757.00	15,259,254,890.00	14,503,186,408.00	1,927,036,239.00
Jumlah	**17,254,264,772.00**	**172,920,408,109.00**	**151,544,462,019.00**	**38,630,210,862.00**

	Saldo	Mutasi		Saldo
	31-Des-2023	Tambah	Kurang	31-Des-2024
Beban Yang Masih Harus Dibayar :				
Utang Gas Medis	2,631,790,768.00	10,564,740,359.00	10,203,820,273.00	2,992,710,854.00
Utang Bagian Yanmed	40,981,200.00	330,676,650.00	371,657,850.00	-
Utang Penunjang Medik	11,029,795,520.00	29,782,595,951.00	24,992,696,748.00	15,819,694,723.00
Utang Bagian Umum	13,618,829,995.00	32,515,787,357.00	38,787,019,866.00	7,347,597,486.00
Utang Bagian Humas	121,384,000.00	737,929,611.00	833,756,611.00	25,557,000.00
Utang RSUP	334,549,697.00	318,240,480.00	-	652,790,177.00
Utang PMI	1,170,650,000.00	2,292,430,000.00	2,104,875,000.00	1,358,205,000.00
Utang Kepegawaian	4,762,000.00	21,231,500.00	18,140,500.00	7,853,000.00
Utang Program	-	13,882,000.00	-	13,882,000.00
Utang Keuangan	-	100,839,600.00	94,932,100.00	5,907,500.00
Utang Bagian Gizi	528,575,549.44	3,429,878,112.08	3,633,280,144.52	325,173,517.00
Utang Kelangkaan Profesi	-	600,536,200.00	-	600,536,200.00
Utang IKJK	25,200,000.00	308,280,000.00	307,080,000.00	26,400,000.00
Utang Keperawatan	-	2,600,000.00	-	2,600,000.00
Aplikasi Smartpsc Desember	22,836,457.00	91,345,828.00	114,182,285.00	-

D. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan (Lanjutan)

3 Neraca (Lanjutan)

g Kewajiban (Lanjutan)

	Saldo 31-Des-2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31-Des-2024
Utang Listrik	302,678,150.00	3,752,490,944.00	3,778,574,700.00	276,594,394.00
Utang Air	478,600.00	19,730,800.00	19,881,400.00	328,000.00
Utang Telepon	4,942,585.00	558,816,488.00	561,571,981.00	2,187,092.00
Jumlah	**29,837,454,521.44**	**85,442,031,880.08**	**85,821,469,458.52**	**29,458,016,943.00**

	Saldo 31-Des-2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31-Des-2024
Pendapatan diterima dimuka (Sewa ATM)	66,666,666.00	-	40,000,000.00	26,666,666.00
Jumlah	**66,666,666.00**	**-**	**40,000,000.00**	**26,666,666.00**

h Ekuitas

Terdiri atas:

	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Kenaikan (Penurunan) %
Ekuitas Awal	417,349,664,741.81	412,780,544,132.78	23,852,232,417.77	5.78
Koreksi	(9,748,843,993.99)	-	(609,667,954.00)	-
Saldo surplus(defisit)	18,228,660,422.26	4,569,120,609.03	19,571,262,139.08	428.34
Jumlah	**425,829,481,170.08**	**417,349,664,741.81**	**42,813,826,602.85**	**10.26**

Koreksi Terdiri Dari :

	2024
Koreksi Saldo awal piutang	
Pasien JKN/BPJS/Kerjasama	(18,196,092,896.00)
Pasien Umum	151,605,780.00
Pasien Tidak Mampu	(1,827,905,048.00)
Total	**(19,872,392,164.00)**
Koreksi saldo penyisihan piutang	
Pasien JKN/BPJS/Kerjasama	7,695,222,026.00
Pasien Umum	315,145,817.76
Pasien Tidak Mampu	2,099,782,026.25
Piutang lainnya	13,398,300.00
Total	**10,123,548,170.01**
Total Koreksi	**(9,748,843,993.99)**

4 Laporan Operasional

a Pendapatan jasa layanan dari masyarakat

Terdiri atas:

	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Kenaikan (Penurunan) %
Pasien JKN/BPJS	227,400,219,429.00	197,454,270,406.00	29,945,949,023.00	15.17
Pasien Umum	15,797,883,265.03	17,721,597,542.69	(1,923,714,277.66)	(10.86)
Pasien Kerjasama	537,627,691.00	521,773,252.00	15,854,439.00	3.04
Jumlah	**243,735,730,385.03**	**215,697,641,200.69**	**28,038,089,184.34**	**13.00**

b Pendapatan hasil kerja sama

Terdiri atas:

	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Kenaikan (Penurunan) %
Pendapatan BLUD Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain	1,582,561,482.00	202,804,145.00	1,379,757,337.00	680.34
Jumlah	**1,582,561,482.00**	**202,804,145.00**	**1,379,757,337.00**	**680.34**

c Pendapatan Usaha lainnya

Terdiri atas:

	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Kenaikan (Penurunan) %
Pendapatan Jasa Giro	55,469,747.39	1,405,906,714.63	(1,350,436,967.24)	(96.05)
Jumlah	**55,469,747.39**	**1,405,906,714.63**	**(1,350,436,967.24)**	**(96.05)**

D. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan (Lanjutan)

4 Laporan Operasional (Lanjutan)

d Pendapatan APBD

Terdiri atas:

	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Kenaikan (Penurunan) %
Subsidi belanja pegawai	28,011,192,990.00	28,451,257,093.00	(440,064,103.00)	(1.55)
Subsidi belanja barang dan jasa	12,581,154,099.00	9,879,421,806.00	2,701,732,293.00	27.35
Subsidi belanja modal	83,352,807,262.00	65,679,692,407.00	17,673,114,855.00	26.91
Jumlah	**123,945,154,351.00**	**104,010,371,306.00**	**19,934,783,045.00**	**19.17**

e Beban Pegawai

Terdiri atas:

	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Kenaikan (Penurunan) %
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	28,011,192,990.00	28,451,257,093.00	(440,064,103.00)	(1.55)
Beban Pegawai BLUD	12,023,872,580.00	9,511,958,261.00	2,511,914,319.00	26.41
Jumlah	**40,035,065,570.00**	**37,963,215,354.00**	**2,071,850,216.00**	**5.46**

f Beban Barang dan Jasa

Terdiri atas:

	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Kenaikan (Penurunan) %
Beban Persediaan	127,599,258,449.83	86,209,979,671.44	41,389,278,778.39	48.01
Beban Jasa Pelayanan	95,877,524,930.00	81,061,235,048.00	14,816,289,882.00	18.28
Beban Pemeliharaan	9,667,250,180.00	25,790,869,273.00	(16,123,619,093.00)	(62.52)
Beban Langganan Daya dan Jasa	9,125,379,134.81	28,248,227,359.14	(19,122,848,224.33)	(67.70)
Jumlah	**242,269,412,694.64**	**221,310,311,351.58**	**20,959,101,343.06**	**9.47**

g Beban Penyisihan Piutang

Terdiri atas:

	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Kenaikan (Penurunan) %
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Pasien BPJS)	9,516,551,850.86	14,396,975,519.50	(4,880,423,668.64)	(33.90)
Jumlah	**9,516,551,850.86**	**14,396,975,519.50**	**(4,880,423,668.64)**	**(33.90)**

h Beban Penyusutan

Terdiri atas:

	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Kenaikan (Penurunan) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	54,551,322,861.00	40,734,257,911.21	13,817,064,949.79	33.92
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,845,793,291.66	1,475,921,089.00	2,369,872,202.66	160.57
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	494,125,242.00	403,734,292.00	90,390,950.00	22.39
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	377,984,033.00	463,187,240.00	(85,203,207.00)	(18.39)
Jumlah	**59,269,225,427.66**	**43,077,100,532.21**	**16,192,124,895.45**	**37.59**

5 Tanggal Penyelesaian Penyusunan Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang diselesaikan pada tanggal 15 April 2025.

Mataram, 15 April 2025
Direktur Rsud Kota Mataram,

dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati, Sp.OG.,K-FER
NIP. 19720403 200212 2 004